



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 97 TAHUN 2025
TENTANG
PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
5. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Peta Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan rasio kapasitas fiskal daerah.
2. Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah dalam rangka melaksanakan pelayanan publik sesuai kewenangannya.

Pasal 2

- (1) Peta Kapasitas Fiskal Daerah digunakan untuk:
 - a. pertimbangan dalam pengusulan daerah penerima hibah yang bersumber dari:
 1. penerimaan dalam negeri; dan/atau
 2. pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri, dalam hal pelaksanaan hibah melalui pembiayaan awal;
 - b. penentuan besaran dana pendamping oleh pemerintah daerah, dalam hal dipersyaratkan;
 - c. pertimbangan dalam pemberian pembiayaan utang daerah;
 - d. pertimbangan dalam pemberian subsidi bunga pinjaman dari lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang mendapat penugasan dari pemerintah pusat;
 - e. pertimbangan dalam pengalokasian transfer ke daerah dan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat berupa belanja kementerian/lembaga dalam rangka sinergi pendanaan; dan
 - f. penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peta Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Peta Kapasitas Fiskal Daerah provinsi; dan
 - b. Peta Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota.
- (3) Peta Kapasitas Fiskal Daerah provinsi dan Peta Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Peta Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a disusun melalui 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. tahap I, penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah provinsi; dan
 - b. tahap II, penghitungan rasio Kapasitas Fiskal Daerah provinsi.
- (2) Peta Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b disusun melalui 2 (dua) tahap, yaitu:

- a. tahap I, penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota; dan
 - b. tahap II, penghitungan rasio Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota.
- (3) Penghitungan Peta Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhitungkan pendapatan daerah terhadap kebutuhan belanja daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sesuai kewenangannya dengan memperhatikan pendapatan daerah yang sudah ditentukan penggunaannya, perkiraan kas yang tersedia, dan keandalan serta ketersediaan data.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap permohonan pembentukan dana abadi daerah yang telah diajukan oleh Pemerintah Daerah sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, proses penilaian terhadap permohonan pembentukan dana abadi daerah dilaksanakan dengan menggunakan kapasitas fiskal daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 628) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1104).

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 628) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1104), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2025

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



PURBAYA YUDHI SADEWA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara. Kode Unik Dokumen dapat dilihat pada tautan <https://bsn.bnn.go.id/verifikasi>.



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 97 TAHUN 2025
TENTANG
PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

1. Peta Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi

No.	Nama Daerah	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
1	Provinsi Aceh	0,788	Sedang
2	Provinsi Sumatera Utara	1,473	Tinggi
3	Provinsi Sumatera Barat	0,535	Rendah
4	Provinsi Riau	0,747	Rendah
5	Provinsi Jambi	0,574	Rendah
6	Provinsi Sumatera Selatan	1,098	Sedang
7	Provinsi Bengkulu	0,432	Rendah
8	Provinsi Lampung	0,798	Sedang
9	Provinsi DKI Jakarta	0,271	Rendah
10	Provinsi Jawa Barat	1,413	Tinggi
11	Provinsi Jawa Tengah	1,004	Sedang
12	Provinsi DI Yogyakarta	0,618	Rendah
13	Provinsi Jawa Timur	1,444	Tinggi
14	Provinsi Kalimantan Barat	0,907	Sedang
15	Provinsi Kalimantan Tengah	0,607	Rendah
16	Provinsi Kalimantan Selatan	0,288	Rendah
17	Provinsi Kalimantan Timur	0,470	Rendah
18	Provinsi Sulawesi Utara	0,550	Rendah
19	Provinsi Sulawesi Tengah	0,386	Rendah
20	Provinsi Sulawesi Selatan	0,874	Sedang
21	Provinsi Sulawesi Tenggara	0,344	Rendah
22	Provinsi Bali	1,096	Sedang
23	Provinsi Nusa Tenggara Barat	0,598	Rendah
24	Provinsi Nusa Tenggara Timur	0,281	Rendah

No.	Nama Daerah	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
25	Provinsi Maluku	0,372	Rendah
26	Provinsi Papua	0,185	Sangat Rendah
27	Provinsi Maluku Utara	0,364	Rendah
28	Provinsi Banten	1,348	Tinggi
29	Provinsi Bangka Belitung	0,306	Rendah
30	Provinsi Gorontalo	0,434	Rendah
31	Provinsi Kepulauan Riau	0,740	Rendah
32	Provinsi Papua Barat	2,545	Sangat Tinggi
33	Provinsi Sulawesi Barat	0,340	Rendah
34	Provinsi Kalimantan Utara	0,406	Rendah
35	Provinsi Papua Selatan	0,163	Sangat Rendah
36	Provinsi Papua Tengah	1,964	Sangat Tinggi
37	Provinsi Papua Pegunungan	0,422	Rendah
38	Provinsi Papua Barat Daya	1,928	Sangat Tinggi

2. Peta Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota

No.	Nama Daerah	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
1	Kab. Aceh Barat	0,057	Rendah
2	Kab. Aceh Besar	0,062	Rendah
3	Kab. Aceh Selatan	0,047	Rendah
4	Kab. Aceh Singkil	0,065	Rendah
5	Kab. Aceh Tengah	0,109	Rendah
6	Kab. Aceh Tenggara	0,047	Rendah
7	Kab. Aceh Timur	0,037	Rendah
8	Kab. Aceh Utara	0,073	Rendah
9	Kab. Bireuen	0,077	Rendah
10	Kab. Pidie	0,101	Rendah
11	Kab. Simeulue	0,073	Rendah

No.	Nama Daerah	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
12	Kota Banda Aceh	0,067	Rendah
13	Kota Sabang	0,079	Rendah
14	Kota Langsa	0,044	Rendah
15	Kota Lhokseumawe	0,117	Rendah
16	Kab. Gayo Lues	0,071	Rendah
17	Kab. Aceh Barat Daya	0,048	Rendah
18	Kab. Aceh Jaya	0,079	Rendah
19	Kab. Nagan Raya	0,079	Rendah
20	Kab. Aceh Tamiang	0,126	Sedang
21	Kab. Bener Meriah	0,070	Rendah
22	Kab. Pidie Jaya	0,067	Rendah
23	Kota Subulussalam	0,078	Rendah
24	Kab. Asahan	0,158	Sedang
25	Kab. Dairi	0,081	Rendah
26	Kab. Deli Serdang	0,208	Sedang
27	Kab. Karo	0,006	Sangat Rendah
28	Kab. Labuhanbatu	0,008	Rendah
29	Kab. Langkat	0,276	Tinggi
30	Kab. Mandailing Natal	0,008	Rendah
31	Kab. Nias	0,049	Rendah
32	Kab. Simalungun	0,030	Rendah
33	Kab. Tapanuli Selatan	0,057	Rendah
34	Kab. Tapanuli Tengah	0,061	Rendah
35	Kab. Tapanuli Utara	0,010	Rendah
36	Kab. Toba	0,005	Sangat Rendah
37	Kota Binjai	0,173	Sedang

No.	Nama Daerah	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
38	Kota Medan	0,332	Tinggi
39	Kota Pematang Siantar	0,251	Tinggi
40	Kota Sibolga	0,155	Sedang
41	Kota Tanjung Balai	0,141	Sedang
42	Kota Tebing Tinggi	0,092	Rendah
43	Kota Padang Sidempuan	0,018	Rendah
44	Kab. Pakpak Bharat	0,085	Rendah
45	Kab. Nias Selatan	0,126	Sedang
46	Kab. Humbang Hasundutan	0,030	Rendah
47	Kab. Serdang Bedagai	0,040	Rendah
48	Kab. Samosir	0,045	Rendah
49	Kab. Batu Bara	0,173	Sedang
50	Kab. Padang Lawas	0,023	Rendah
51	Kab. Padang Lawas Utara	0,007	Rendah
52	Kab. Labuhanbatu Selatan	0,081	Rendah
53	Kab. Labuhanbatu Utara	0,065	Rendah
54	Kab. Nias Utara	0,160	Sedang
55	Kab. Nias Barat	0,052	Rendah
56	Kota Gunungsitoli	0,023	Rendah
57	Kab. Limapuluh Kota	0,004	Sangat Rendah
58	Kab. Agam	0,038	Rendah
59	Kab. Kepulauan Mentawai	0,024	Rendah
60	Kab. Padang Pariaman	0,005	Sangat Rendah
61	Kab. Pasaman	0,003	Sangat Rendah
62	Kab. Pesisir Selatan	0,003	Sangat Rendah
63	Kab. Sijunjung	0,004	Sangat Rendah

No.	Nama Daerah	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
64	Kab. Solok	0,015	Rendah
65	Kab. Tanah Datar	0,003	Sangat Rendah
66	Kota Bukittinggi	0,234	Sedang
67	Kota Padang Panjang	0,076	Rendah
68	Kota Padang	0,123	Sedang
69	Kota Payakumbuh	0,099	Rendah
70	Kota Sawahlunto	0,007	Sangat Rendah
71	Kota Solok	0,141	Sedang
72	Kota Pariaman	0,040	Rendah
73	Kab. Pasaman Barat	0,008	Rendah
74	Kab. Dharmasraya	0,011	Rendah
75	Kab. Solok Selatan	0,040	Rendah
76	Kab. Bengkalis	0,010	Rendah
77	Kab. Indragiri Hilir	0,025	Rendah
78	Kab. Indragiri Hulu	0,054	Rendah
79	Kab. Kampar	0,030	Rendah
80	Kab. Kuantan Singingi	0,011	Rendah
81	Kab. Pelalawan	0,013	Rendah
82	Kab. Rokan Hilir	0,011	Rendah
83	Kab. Rokan Hulu	0,020	Rendah
84	Kab. Siak	0,010	Rendah
85	Kota Dumai	0,208	Sedang
86	Kota Pekanbaru	0,184	Sedang
87	Kab. Kepulauan Meranti	0,003	Sangat Rendah
88	Kab. Batang Hari	0,040	Rendah
89	Kab. Bungo	0,032	Rendah

No.	Nama Daerah	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
90	Kab. Kerinci	0,052	Rendah
91	Kab. Merangin	0,040	Rendah
92	Kab. Muaro Jambi	0,057	Rendah
93	Kab. Sarolangun	0,030	Rendah
94	Kab. Tanjung Jabung Barat	0,104	Rendah
95	Kab. Tanjung Jabung Timur	0,035	Rendah
96	Kab. Tebo	0,076	Rendah
97	Kota Jambi	0,219	Sedang
98	Kota Sungai Penuh	0,009	Rendah
99	Kab. Lahat	0,145	Sedang
100	Kab. Musi Banyuasin	0,056	Rendah
101	Kab. Musi Rawas	0,040	Rendah
102	Kab. Muara Enim	0,328	Tinggi
103	Kab. Ogan Komering Ilir	0,026	Rendah
104	Kab. Ogan Komering Ulu	0,033	Rendah
105	Kota Palembang	0,249	Tinggi
106	Kota Prabumulih	0,177	Sedang
107	Kota Pagar Alam	0,132	Sedang
108	Kota Lubuk Linggau	0,196	Sedang
109	Kab. Banyuasin	0,039	Rendah
110	Kab. Ogan Ilir	0,070	Rendah
111	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	0,022	Rendah
112	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	0,010	Rendah
113	Kab. Empat Lawang	0,019	Rendah
114	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	0,091	Rendah
115	Kab. Musi Rawas Utara	0,095	Rendah

No.	Nama Daerah	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
116	Kab. Bengkulu Selatan	0,036	Rendah
117	Kab. Bengkulu Utara	0,052	Rendah
118	Kab. Rejang Lebong	0,052	Rendah
119	Kota Bengkulu	0,108	Rendah
120	Kab. Kaur	0,004	Sangat Rendah
121	Kab. Seluma	0,009	Rendah
122	Kab. Mukomuko	0,042	Rendah
123	Kab. Lebong	0,003	Sangat Rendah
124	Kab. Kepahiang	0,003	Sangat Rendah
125	Kab. Bengkulu Tengah	0,018	Rendah
126	Kab. Lampung Barat	0,040	Rendah
127	Kab. Lampung Selatan	0,122	Sedang
128	Kab. Lampung Tengah	0,217	Sedang
129	Kab. Lampung Utara	0,022	Rendah
130	Kab. Lampung Timur	0,038	Rendah
131	Kab. Tanggamus	0,010	Rendah
132	Kab. Tulang Bawang	0,005	Sangat Rendah
133	Kab. Way Kanan	0,038	Rendah
134	Kota Bandar Lampung	0,152	Sedang
135	Kota Metro	0,075	Rendah
136	Kab. Pesawaran	0,014	Rendah
137	Kab. Pringsewu	0,028	Rendah
138	Kab. Mesuji	0,007	Rendah
139	Kab. Tulang Bawang Barat	0,079	Rendah
140	Kab. Pesisir Barat	0,005	Sangat Rendah
141	Kab. Bandung	0,309	Tinggi

No.	Nama Daerah	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
142	Kab. Bekasi	0,251	Tinggi
143	Kab. Bogor	0,192	Sedang
144	Kab. Ciamis	0,010	Rendah
145	Kab. Cianjur	0,028	Rendah
146	Kab. Cirebon	0,008	Rendah
147	Kab. Garut	0,037	Rendah
148	Kab. Indramayu	0,038	Rendah
149	Kab. Karawang	0,358	Sangat Tinggi
150	Kab. Kuningan	0,029	Rendah
151	Kab. Majalengka	0,009	Rendah
152	Kab. Purwakarta	0,015	Rendah
153	Kab. Subang	0,352	Sangat Tinggi
154	Kab. Sukabumi	0,095	Rendah
155	Kab. Sumedang	0,033	Rendah
156	Kab. Tasikmalaya	0,021	Rendah
157	Kota Bandung	0,288	Tinggi
158	Kota Bekasi	0,084	Rendah
159	Kota Bogor	0,427	Sangat Tinggi
160	Kota Cirebon	0,015	Rendah
161	Kota Depok	0,332	Tinggi
162	Kota Sukabumi	0,097	Rendah
163	Kota Tasikmalaya	0,105	Rendah
164	Kota Cimahi	0,226	Sedang
165	Kota Banjar	0,018	Rendah
166	Kab. Bandung Barat	0,107	Rendah
167	Kab. Pangandaran	0,011	Rendah

No.	Nama Daerah	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
168	Kab. Banjarnegara	0,011	Rendah
169	Kab. Banyumas	0,007	Sangat Rendah
170	Kab. Batang	0,032	Rendah
171	Kab. Blora	0,003	Sangat Rendah
172	Kab. Boyolali	0,244	Tinggi
173	Kab. Brebes	0,052	Rendah
174	Kab. Cilacap	0,030	Rendah
175	Kab. Demak	0,087	Rendah
176	Kab. Grobogan	0,046	Rendah
177	Kab. Jepara	0,071	Rendah
178	Kab. Karanganyar	0,072	Rendah
179	Kab. Kebumen	0,050	Rendah
180	Kab. Kendal	0,020	Rendah
181	Kab. Klaten	0,079	Rendah
182	Kab. Kudus	0,164	Sedang
183	Kab. Magelang	0,062	Rendah
184	Kab. Pati	0,126	Sedang
185	Kab. Pekalongan	0,005	Sangat Rendah
186	Kab. Pemalang	0,005	Sangat Rendah
187	Kab. Purbalingga	0,038	Rendah
188	Kab. Purworejo	0,051	Rendah
189	Kab. Rembang	0,016	Rendah
190	Kab. Semarang	0,108	Rendah
191	Kab. Sragen	0,058	Rendah
192	Kab. Sukoharjo	0,165	Sedang
193	Kab. Tegal	0,083	Rendah

No.	Nama Daerah	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
194	Kab. Temanggung	0,033	Rendah
195	Kab. Wonogiri	0,056	Rendah
196	Kab. Wonosobo	0,026	Rendah
197	Kota Magelang	0,092	Rendah
198	Kota Pekalongan	0,177	Sedang
199	Kota Salatiga	0,251	Tinggi
200	Kota Semarang	0,394	Sangat Tinggi
201	Kota Surakarta	0,179	Sedang
202	Kota Tegal	0,048	Rendah
203	Kab. Bantul	0,035	Rendah
204	Kab. Gunung Kidul	0,033	Rendah
205	Kab. Kulon Progo	0,065	Rendah
206	Kab. Sleman	0,202	Sedang
207	Kota Yogyakarta	0,180	Sedang
208	Kab. Bangkalan	0,011	Rendah
209	Kab. Banyuwangi	0,116	Rendah
210	Kab. Blitar	0,048	Rendah
211	Kab. Bojonegoro	0,515	Sangat Tinggi
212	Kab. Bondowoso	0,028	Rendah
213	Kab. Gresik	0,258	Tinggi
214	Kab. Jember	0,019	Rendah
215	Kab. Jombang	0,028	Rendah
216	Kab. Kediri	0,037	Rendah
217	Kab. Lamongan	0,026	Rendah
218	Kab. Lumajang	0,091	Rendah
219	Kab. Madiun	0,061	Rendah

No.	Nama Daerah	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
220	Kab. Magetan	0,059	Rendah
221	Kab. Malang	0,122	Sedang
222	Kab. Mojokerto	0,190	Sedang
223	Kab. Nganjuk	0,095	Rendah
224	Kab. Ngawi	0,003	Sangat Rendah
225	Kab. Pacitan	0,002	Sangat Rendah
226	Kab. Pamekasan	0,017	Rendah
227	Kab. Pasuruan	0,021	Rendah
228	Kab. Ponorogo	0,033	Rendah
229	Kab. Probolinggo	0,061	Rendah
230	Kab. Sampang	0,008	Rendah
231	Kab. Sidoarjo	0,132	Sedang
232	Kab. Situbondo	0,052	Rendah
233	Kab. Sumenep	0,136	Sedang
234	Kab. Trenggalek	0,002	Sangat Rendah
235	Kab. Tuban	0,234	Sedang
236	Kab. Tulungagung	0,140	Sedang
237	Kota Blitar	0,038	Rendah
238	Kota Kediri	0,531	Sangat Tinggi
239	Kota Madiun	0,275	Tinggi
240	Kota Malang	0,459	Sangat Tinggi
241	Kota Mojokerto	0,010	Rendah
242	Kota Pasuruan	0,109	Rendah
243	Kota Probolinggo	0,078	Rendah
244	Kota Surabaya	0,296	Tinggi
245	Kota Batu	0,158	Sedang

No.	Nama Daerah	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
246	Kab. Bengkayang	0,010	Rendah
247	Kab. Landak	0,077	Rendah
248	Kab. Kapuas Hulu	0,014	Rendah
249	Kab. Ketapang	0,017	Rendah
250	Kab. Mempawah	0,148	Sedang
251	Kab. Sambas	0,031	Rendah
252	Kab. Sanggau	0,015	Rendah
253	Kab. Sintang	0,102	Rendah
254	Kota Pontianak	0,330	Tinggi
255	Kota Singkawang	0,175	Sedang
256	Kab. Sekadau	0,089	Rendah
257	Kab. Melawi	0,042	Rendah
258	Kab. Kayong Utara	0,084	Rendah
259	Kab. Kubu Raya	0,192	Sedang
260	Kab. Barito Selatan	0,063	Rendah
261	Kab. Barito Utara	0,599	Sangat Tinggi
262	Kab. Kapuas	0,278	Tinggi
263	Kab. Kotawaringin Barat	0,016	Rendah
264	Kab. Kotawaringin Timur	0,075	Rendah
265	Kota Palangka Raya	0,218	Sedang
266	Kab. Katingan	0,027	Rendah
267	Kab. Seruyan	0,012	Rendah
268	Kab. Sukamara	0,010	Rendah
269	Kab. Lamandau	0,019	Rendah
270	Kab. Gunung Mas	0,056	Rendah
271	Kab. Pulang Pisau	0,063	Rendah

No.	Nama Daerah	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
272	Kab. Murung Raya	0,139	Sedang
273	Kab. Barito Timur	0,093	Rendah
274	Kab. Banjar	0,168	Sedang
275	Kab. Barito Kuala	0,136	Sedang
276	Kab. Hulu Sungai Selatan	0,380	Sangat Tinggi
277	Kab. Hulu Sungai Tengah	0,249	Tinggi
278	Kab. Hulu Sungai Utara	0,176	Sedang
279	Kab. Kotabaru	0,006	Sangat Rendah
280	Kab. Tabalong	0,318	Tinggi
281	Kab. Tanah Laut	0,247	Tinggi
282	Kab. Tapin	0,010	Rendah
283	Kota Banjarbaru	0,157	Sedang
284	Kota Banjarmasin	0,171	Sedang
285	Kab. Balangan	0,168	Sedang
286	Kab. Tanah Bumbu	0,339	Tinggi
287	Kab. Berau	0,183	Sedang
288	Kab. Kutai Kartanegara	0,004	Sangat Rendah
289	Kab. Kutai Barat	0,304	Tinggi
290	Kab. Kutai Timur	0,006	Sangat Rendah
291	Kab. Paser	0,042	Rendah
292	Kota Balikpapan	0,033	Rendah
293	Kota Bontang	0,050	Rendah
294	Kota Samarinda	0,103	Rendah
295	Kab. Penajam Paser Utara	0,004	Sangat Rendah
296	Kab. Mahakam Ulu	0,003	Sangat Rendah
297	Kab. Bolaang Mongondow	0,034	Rendah

No.	Nama Daerah	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
298	Kab. Minahasa	0,061	Rendah
299	Kab. Kepulauan Sangihe	0,038	Rendah
300	Kota Bitung	0,277	Tinggi
301	Kota Manado	0,414	Sangat Tinggi
302	Kab. Kepulauan Talaud	0,009	Rendah
303	Kab. Minahasa Selatan	0,025	Rendah
304	Kota Tomohon	0,097	Rendah
305	Kab. Minahasa Utara	0,150	Sedang
306	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	0,052	Rendah
307	Kota Kotamobagu	0,017	Rendah
308	Kab. Bolaang Mongondow Utara	0,051	Rendah
309	Kab. Minahasa Tenggara	0,005	Sangat Rendah
310	Kab. Bolaang Mongondow Timur	0,014	Rendah
311	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	0,070	Rendah
312	Kab. Banggai	0,005	Sangat Rendah
313	Kab. Banggai Kepulauan	0,001	Sangat Rendah
314	Kab. Buol	0,018	Rendah
315	Kab. Toli-Toli	0,099	Rendah
316	Kab. Donggala	0,192	Sedang
317	Kab. Morowali	0,598	Sangat Tinggi
318	Kab. Poso	0,025	Rendah
319	Kota Palu	0,072	Rendah
320	Kab. Parigi Moutong	0,030	Rendah
321	Kab. Tojo Una-Una	0,005	Sangat Rendah
322	Kab. Sigi	0,006	Sangat Rendah
323	Kab. Banggai Laut	0,001	Sangat Rendah

No.	Nama Daerah	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
324	Kab. Morowali Utara	0,005	Sangat Rendah
325	Kab. Bantaeng	0,066	Rendah
326	Kab. Barru	0,071	Rendah
327	Kab. Bone	0,039	Rendah
328	Kab. Bulukumba	0,045	Rendah
329	Kab. Enrekang	0,025	Rendah
330	Kab. Gowa	0,191	Sedang
331	Kab. Jeneponto	0,143	Sedang
332	Kab. Luwu	0,031	Rendah
333	Kab. Luwu Utara	0,014	Rendah
334	Kab. Maros	0,155	Sedang
335	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	0,222	Sedang
336	Kota Palopo	0,025	Rendah
337	Kab. Luwu Timur	0,053	Rendah
338	Kab. Pinrang	0,047	Rendah
339	Kab. Sinjai	0,006	Sangat Rendah
340	Kab. Kepulauan Selayar	0,001	Sangat Rendah
341	Kab. Sidenreng Rappang	0,040	Rendah
342	Kab. Soppeng	0,129	Sedang
343	Kab. Takalar	0,028	Rendah
344	Kab. Tana Toraja	0,107	Rendah
345	Kab. Wajo	0,042	Rendah
346	Kota Parepare	0,057	Rendah
347	Kota Makassar	0,348	Tinggi
348	Kab. Toraja Utara	0,077	Rendah
349	Kab. Buton	0,027	Rendah

No.	Nama Daerah	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
350	Kab. Konawe	0,059	Rendah
351	Kab. Kolaka	0,085	Rendah
352	Kab. Muna	0,002	Sangat Rendah
353	Kota Kendari	0,120	Rendah
354	Kota Bau-bau	0,175	Sedang
355	Kab. Konawe Selatan	0,004	Sangat Rendah
356	Kab. Bombana	0,002	Sangat Rendah
357	Kab. Wakatobi	0,030	Rendah
358	Kab. Kolaka Utara	0,006	Sangat Rendah
359	Kab. Konawe Utara	0,003	Sangat Rendah
360	Kab. Buton Utara	0,041	Rendah
361	Kab. Konawe Kepulauan	0,188	Sedang
362	Kab. Kolaka Timur	0,014	Rendah
363	Kab. Muna Barat	0,021	Rendah
364	Kab. Buton Tengah	0,124	Sedang
365	Kab. Buton Selatan	0,065	Rendah
366	Kab. Badung	0,800	Sangat Tinggi
367	Kab. Bangli	0,006	Sangat Rendah
368	Kab. Buleleng	0,106	Rendah
369	Kab. Gianyar	0,483	Sangat Tinggi
370	Kab. Jembrana	0,048	Rendah
371	Kab. Karangasem	0,073	Rendah
372	Kab. Klungkung	0,035	Rendah
373	Kab. Tabanan	0,010	Rendah
374	Kota Denpasar	0,333	Tinggi
375	Kab. Bima	0,032	Rendah

No.	Nama Daerah	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
376	Kab. Dompu	0,028	Rendah
377	Kab. Lombok Barat	0,165	Sedang
378	Kab. Lombok Tengah	0,176	Sedang
379	Kab. Lombok Timur	0,048	Rendah
380	Kab. Sumbawa	0,034	Rendah
381	Kota Mataram	0,116	Rendah
382	Kota Bima	0,020	Rendah
383	Kab. Sumbawa Barat	0,457	Sangat Tinggi
384	Kab. Lombok Utara	0,221	Sedang
385	Kab. Alor	0,069	Rendah
386	Kab. Belu	0,046	Rendah
387	Kab. Ende	0,020	Rendah
388	Kab. Flores Timur	0,059	Rendah
389	Kab. Kupang	0,040	Rendah
390	Kab. Lembata	0,006	Sangat Rendah
391	Kab. Manggarai	0,017	Rendah
392	Kab. Ngada	0,100	Rendah
393	Kab. Sikka	0,019	Rendah
394	Kab. Sumba Barat	0,181	Sedang
395	Kab. Sumba Timur	0,009	Rendah
396	Kab. Timor Tengah Selatan	0,037	Rendah
397	Kab. Timor Tengah Utara	0,069	Rendah
398	Kota Kupang	0,216	Sedang
399	Kab. Rote Ndao	0,008	Rendah
400	Kab. Manggarai Barat	0,074	Rendah
401	Kab. Nagekeo	0,050	Rendah

No.	Nama Daerah	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
402	Kab. Sumba Barat Daya	0,102	Rendah
403	Kab. Sumba Tengah	0,060	Rendah
404	Kab. Manggarai Timur	0,060	Rendah
405	Kab. Sabu Raijua	0,087	Rendah
406	Kab. Malaka	0,017	Rendah
407	Kab. Kepulauan Tanimbar	0,253	Tinggi
408	Kab. Maluku Tengah	0,127	Sedang
409	Kab. Maluku Tenggara	0,004	Sangat Rendah
410	Kab. Buru	0,016	Rendah
411	Kota Ambon	0,199	Sedang
412	Kab. Seram Bagian Barat	0,171	Sedang
413	Kab. Seram Bagian Timur	0,083	Rendah
414	Kab. Kepulauan Aru	0,083	Rendah
415	Kota Tual	0,150	Sedang
416	Kab. Maluku Barat Daya	0,016	Rendah
417	Kab. Buru Selatan	0,009	Rendah
418	Kab. Biak Numfor	0,193	Sedang
419	Kab. Jayapura	0,110	Rendah
420	Kab. Kepulauan Yapen	0,160	Sedang
421	Kota Jayapura	0,233	Sedang
422	Kab. Sarmi	0,142	Sedang
423	Kab. Keerom	0,063	Rendah
424	Kab. Waropen	0,084	Rendah
425	Kab. Supiori	0,133	Sedang
426	Kab. Mamberamo Raya	0,302	Tinggi
427	Kab. Halmahera Tengah	0,135	Sedang

No.	Nama Daerah	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
428	Kota Ternate	0,142	Sedang
429	Kab. Halmahera Barat	0,118	Rendah
430	Kab. Halmahera Timur	0,386	Sangat Tinggi
431	Kab. Halmahera Selatan	0,252	Tinggi
432	Kab. Halmahera Utara	0,073	Rendah
433	Kab. Kepulauan Sula	0,108	Rendah
434	Kota Tidore Kepulauan	0,047	Rendah
435	Kab. Pulau Morotai	0,011	Rendah
436	Kab. Pulau Taliabu	0,055	Rendah
437	Kab. Lebak	0,027	Rendah
438	Kab. Pandeglang	0,006	Sangat Rendah
439	Kab. Serang	0,033	Rendah
440	Kab. Tangerang	0,390	Sangat Tinggi
441	Kota Cilegon	0,238	Tinggi
442	Kota Tangerang	0,280	Tinggi
443	Kota Serang	0,138	Sedang
444	Kota Tangerang Selatan	0,442	Sangat Tinggi
445	Kab. Bangka	0,031	Rendah
446	Kab. Belitung	0,102	Rendah
447	Kota Pangkal Pinang	0,098	Rendah
448	Kab. Bangka Selatan	0,008	Rendah
449	Kab. Bangka Tengah	0,009	Rendah
450	Kab. Bangka Barat	0,025	Rendah
451	Kab. Belitung Timur	0,053	Rendah
452	Kab. Boalemo	0,004	Sangat Rendah
453	Kab. Gorontalo	0,013	Rendah

No.	Nama Daerah	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
454	Kota Gorontalo	0,007	Sangat Rendah
455	Kab. Pohuwato	0,003	Sangat Rendah
456	Kab. Bone Bolango	0,025	Rendah
457	Kab. Gorontalo Utara	0,002	Sangat Rendah
458	Kab. Natuna	0,013	Rendah
459	Kab. Kepulauan Anambas	0,005	Sangat Rendah
460	Kab. Karimun	0,074	Rendah
461	Kota Batam	0,343	Tinggi
462	Kota Tanjung Pinang	0,109	Rendah
463	Kab. Lingga	0,007	Sangat Rendah
464	Kab. Bintan	0,017	Rendah
465	Kab. Fakfak	0,088	Rendah
466	Kab. Manokwari	0,069	Rendah
467	Kab. Teluk Bintuni	0,395	Sangat Tinggi
468	Kab. Teluk Wondama	0,178	Sedang
469	Kab. Kaimana	0,213	Sedang
470	Kab. Manokwari Selatan	0,182	Sedang
471	Kab. Pegunungan Arfak	0,431	Sangat Tinggi
472	Kab. Majene	0,043	Rendah
473	Kab. Mamuju	0,065	Rendah
474	Kab. Polewali Mandar	0,011	Rendah
475	Kab. Mamasa	0,024	Rendah
476	Kab. Pasangkayu	0,042	Rendah
477	Kab. Mamuju Tengah	0,050	Rendah
478	Kab. Bulungan	0,229	Sedang
479	Kab. Malinau	0,138	Sedang

No.	Nama Daerah	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
480	Kab. Nunukan	0,013	Rendah
481	Kota Tarakan	0,312	Tinggi
482	Kab. Tana Tidung	0,273	Tinggi
483	Kab. Merauke	0,190	Sedang
484	Kab. Boven Digoel	0,142	Sedang
485	Kab. Mappi	0,207	Sedang
486	Kab. Asmat	0,319	Tinggi
487	Kab. Mimika	0,262	Tinggi
488	Kab. Nabire	0,335	Tinggi
489	Kab. Paniai	0,417	Sangat Tinggi
490	Kab. Puncak Jaya	0,150	Sedang
491	Kab. Dogiyai	0,313	Tinggi
492	Kab. Puncak	0,480	Sangat Tinggi
493	Kab. Intan Jaya	0,534	Sangat Tinggi
494	Kab. Deiyai	0,578	Sangat Tinggi
495	Kab. Jayawijaya	0,246	Tinggi
496	Kab. Yahukimo	0,220	Sedang
497	Kab. Pegunungan Bintang	0,248	Tinggi
498	Kab. Tolikara	0,187	Sedang
499	Kab. Mamberamo Tengah	0,529	Sangat Tinggi
500	Kab. Yalimo	0,218	Sedang
501	Kab. Lanny Jaya	0,193	Sedang
502	Kab. Nduga	0,244	Tinggi
503	Kab. Sorong	0,124	Sedang
504	Kota Sorong	0,490	Sangat Tinggi
505	Kab. Raja Ampat	0,230	Sedang

No.	Nama Daerah	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
506	Kab. Sorong Selatan	0,113	Rendah
507	Kab. Maybrat	0,118	Rendah
508	Kab. Tambrauw	0,126	Sedang

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PURBAYA YUDHI SADEWA